

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua akan diuraikan mengenai landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang melandasi kerangka pemikiran dalam mendukung perumusan hipotesis, yang didukung dengan penelitian terdahulu. Setelah itu membahas kerangka pemikiran teoritis yang menjelaskan tentang model dan hubungan antar variabel yang akan diteliti, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk menyusun hipotesis (dugaan awal penelitian).

2.1.1 Indeks Harga Konsumen

2.1.1.1 Pengertian Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) atau lebih dikenal dengan istilah *Consumer Price Index* (CPI) yaitu indeks yang mengukur harga dari barang dan jasa yang selalu digunakan para konsumen atau rumah tangga yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Dalam Mufidah (2018) Indeks Harga Konsumen adalah angka yang menggambarkan perbandingan harga konsumen yang terjadi pada suatu periode waktu dengan periode waktu tertentu, IHK merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat pergerakan atau perubahan naik turunnya harga secara umum. Indeks ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan harga barang dan jasa di pasar secara riil. Harga konsumen barang dan jasa disini mencakup semua barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum, diantaranya meliputi kelompok bahan makanan, makanan jadi,

minuman rokok dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta kelompok transportasi dan komunikasi, dimana harga komoditas ini dipengaruhi oleh biaya produksi, nilai uang dan nilai barang, pendapatan masyarakat, jumlah permintaan terhadap barang, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan perdagangan dengan luar negeri (ekspor-impor).

Indeks harga konsumen merupakan salah satu komponen pembentuk inflasi. Di Indonesia dan beberapa negara berkembang, penghitungan inflasi dilakukan dengan memanfaatkan nilai perubahan IHK dengan asumsi bahwa IHK mampu mencerminkan kondisi pasar karena ukuran yang digunakan IHK adalah harga ditingkat konsumen. Perkembangan IHK menunjukkan keetidakstabilan harga di pasaran, sehingga secara umum mempengaruhi rata-rata harga yang tercipta antara produsen dengan konsumen dalam (Kasmara, 2020).

2.1.1.2 Perhitungan Indeks Harga Konsumen

Dalam analisis ekonomi, indeks harga menunjukkan besarnya perubahan rata-rata harga sekumpulan barang dari suatu waktu ke waktu lainnya. Untuk menunjukkan besarnya perubahan tersebut diperlukan suatu masa/tahun yang akan dijadikan sebagai titik tolak dalam melihat besarnya perubahan harga yang berlaku. Masa tersebut dinamakan tahun dasar (*base year*). Untuk tahun dasar itu angka indeksnya diberi nilai 100. Angka indeks pada tahun-tahun lainnya, sebelum atau sesudahnya, dihitung berdasarkan kepada keadaan perubahan harga-harga yang berlaku jika dibandingkan dengan tahun dasar. Perhitungan indeks harga konsumen dilakukan oleh BPS berdasarkan tahun dasar 2012 yang diperoleh dari Survei Biaya

Hidup (SBH) 2012. Perhitungan IHK telah mengalami beberapa kali perubahan tahun dasar mencakup perubahan bobot, cakupan komoditas dan kota, yaitu:

1. Pada periode Juni 2008 – Desember 2013 perhitungan IHK berdasarkan tahun dasar 2007 (2001=100) yang diperoleh dari SBH tahun 2007.
2. Pada periode Januari 2004 – Mei 2008 perhitungan IHK berdasarkan tahun dasar 2002 (2002=100) yang diperoleh dari SBH tahun 2002.
3. Pada periode April 1998 – Desember 2003 perhitungan IHK berdasarkan tahun dasar 1996 (1996=100) yang diperoleh dari SBH tahun 1996.
4. Sebelum periode April 1998 perhitungan IHK menggunakan SBH tahun 1988-1989.

Adapun rumus dari IHK itu sendiri adalah:

$$IHK = \frac{P_n}{P_0} \times 100\%$$

(Mufidah, 2018)

Dimana:

P_n = harga di tahun yang sedang dihitung

P_0 = harga di tahun 0, yakni tahun dasar atau tahun awal perhitungan.

2.1.1.3 Klasifikasi Indeks Harga Konsumen

Menurut BPS (2020) IHK adalah indeks dari harga yang dibayar konsumen/masyarakat Indonesia untuk mendapatkan barang dan jasa tujuh kelompok komoditi, yaitu:

1. Bahan makanan: padi-padian, umbi-umbian dan hasil-hasilnya, daging dan hasil-hasilnya, ikan segar, ikan diawetkan, telur, susu dan hasilnya, sayur-

sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, bumbu-bumbuan, lemak dan minyak, bahan makanan lainnya.

2. Makanan jadi, minuman, roko, dan tembakau: makanan jadi, minuman non alkohol, tembakau, dan minuman beralkohol.
3. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar: biaya tempat tinggal, bahan bakar, penerangan, air, perlengkapan rumah tangga, penyelenggaraan rumah.
4. Sandang: sandang laki-laki, sandang wanita, sandang anak-anak, barang pribadi, dan sandang lainnya.
5. Kesehatan: jasa kesehatan, obat-obatan, jasa perawatan jasmani dan kosmetik.
6. Pendidikan, rekreasi, dan olahraga: jasa pendidikan, kursus-kursus/pelatihan, perlengkapan/peralatan pendidikan, rekreasi, olahraga.
7. Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan: transportasi, komunikasi, pengiriman, sarana dan penunjang transportasi, jasa keuangan.

2.1.1.4 Faktor – faktor Indeks Harga Konsumen

Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan harga konsumen (Mankiw, 2014) adalah:

1. Kebijakan pemerintah berkenaan dengan politik ekonomi dan moneter serta perdagangan luar negeri;
2. Kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Jumlah permintaan konsumen;
4. Pendapatan masyarakat;

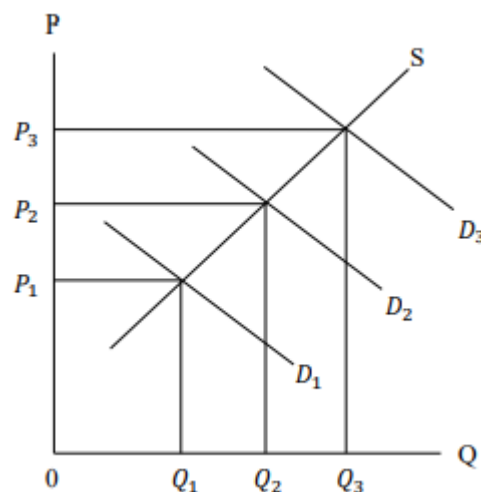
5. Biaya produksi;
6. Nilai mata uang.

2.1.1.5 Teori Indeks Harga Konsumen

Teori – teori yang berkaitan dengan Indeks Harga Konsumen (Mankiw, 2016) sebagai berikut:

1. Teori *Demand Pull Inflation*

Demand pull inflation adalah inflasi yang ditandai dengan adanya kenaikan/ kelebihan permintaan. Biasanya hal ini disebabkan karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang di biayai dengan percetakan uang baru, bertambahnya investasi swasta karena adanya kredit murah, serta bertambahnya permintaan barang-barang ekspor dan sebagainya.



Sumber: Mankiw, 2016

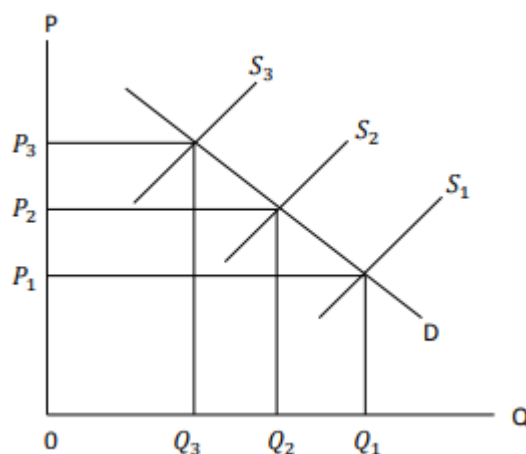
Gambar 2.1 Kurva *Demand Pull Inflation*

Pada mulanya perekonomian berada pada harga setinggi P_1 dengan jumlah barang yang dijual-belikan sebanyak Q_1 . Ketika terjadi permintaan barang, maka akan menggeser kurva permintaan dari D_1 ke D_2 . Pergeseran kurva

ini, akan menaikkan harga dari P_1 menjadi P_2 serta menambah jumlah produksi dari Q_1 ke Q_2 . Hal ini akan berlanjut seterusnya. Kenaikan harga secara terus-menerus akibat adanya kenaikan permintaan inilah yang dinamakan “*Demand Pull Inflation*”.

2. Teori *Cost Push Inflation*

Cost push inflation adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi, misalnya adanya kenaikan upah maka cenderung produksi akan menurun.



Sumber: Mankiw, 2016

Gambar 2.2 *Cost Push Inflation*

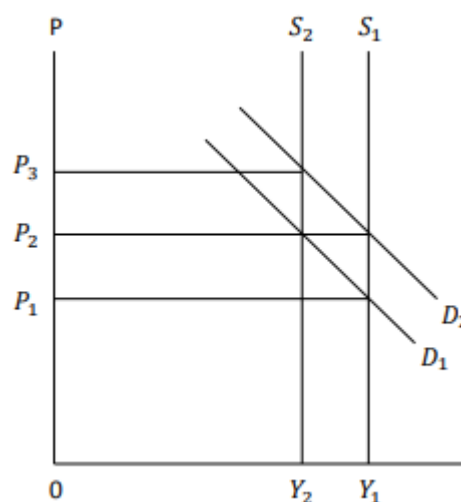
Mula-mula, keseimbangan berada pada harga setinggi P_1 dan kuantitas sebesar Q_1 . Ketika terjadi kenaikan biaya produksi (kenaikan upah), maka produksi akan menurun, ditandai dengan bergesernya kurva S_1 menjadi S_2 . Pergeseran kurva penawaran ini menunjukkan menurunnya produksi dari Q_1 ke Q_2 dan menaikkan harga barang hasil produksi dari P_1 ke P_2 . Apabila terjadi kenaikan biaya produksi, maka akan menurunkan

hasil produksi dan terus menggeser kurva penawaran sehingga akan menaikkan harga produksi. Keberlangsungan hal tersebutlah yang dinamakan *cost push inflation* (inflasi karena dorongan biaya).

Demand pull inflation dan *cost push inflation* sama-sama menaikkan harga produksi, namun *demand pull inflation* akan menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) karena menaikkan jumlah produksi sementara *cost push inflation* akan menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) karena menurunkan jumlah produksi.

3. Inflasi Permintaan dan Penawaran

Inflasi permintaan dan penawaran terjadi ketika kenaikan penawaran diikuti dengan terjadinya penurunan produksi sehingga mengakibatkan harga naik secara terus menerus.



Sumber: Mankiw, 2016

Gambar 2.3 Inflasi Permintaan dan Penawaran

Ketika terjadi kenaikan permintaan harga secara keseluruhan maka akan menggeser kurva permintaan dari D_1 menjadi D_2 yang mengakibatkan

harga naik dari P_1 ke P_2 , sehingga dalam hal ini tidak terjadi demand pull inflation. Namun ketika terjadi perkiraan bahwa akan terjadi inflasi, maka perusahaan akan menaikkan harga dan para buruh akan selalu meminta kenaikan upah. Hal ini akan ditandai dengan bergesernya kurva penawaran yang horizontal ke atas. Pergeseran kurva penawaran yang horizontal ini akan mengakibatkan harga naik dari P_2 menjadi P_3 . Sehingga mengakibatkan inflasi sisi penawaran dengan harga yang naik secara terus-menerus dan diikuti dengan turunnya produksi dari Y_1 ke Y_2 dan seterusnya.

2.1.2 *BI Rate*

2.1.2.1 Pengertian *BI Rate*

BI Rate adalah suku bunga acuan kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (Bank Indonesia, 2017). Kenaikan suku bunga akan memicu terjadinya gejolak pada pasar keuangan, naiknya suku bunga akan dapat menarik aliran modal asing masuk berupa pinjaman. Pinjaman ini akan secara langsung dapat menambah cadangan devisa secara langsung yaitu berpengaruh positif dan begitup sebaliknya.

Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto. Pihak-pihak yang dapat memiliki SBI adalah Bank Umum dan masyarakat. Bank dapat membeli SBI di pasar perdana, sementara masyarakat umum hanya diperbolehkan membeli di pasar sekunder.

2.1.2.2 Teori Kaum Klasik

Menurut kaum klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian yang menyebabkan tabungan yang tercipta pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama yang dilakukan oleh pengusaha (Mankiw, 2016). Efek persamaan Fisher (*Fisher Equation*) menunjukkan tingkat bunga bisa berubah karena ada dua alasan yaitu karena tingkat bunga riil berubah atau karena tingkat inflasi berubah. Dikembangkan oleh Irving Fisher (1930) dalam (Mankiw, 2016), berikut adalah rumus persamaan Fisher:

$$MV = PT$$

Keterangan:

M = Jumlah uang beredar atau penawaran uang dalam perekonomian

V = Tingkat perputaran uang (*velocity of money*)

P = Tingkat harga

T = Total jumlah transaksi selama periode tertentu.

2.1.2.3 Teori Keynes

Teori Keynes mempunyai pandangan yang berbeda dengan klasik. Tingkat bunga itu merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi atau *Gross National Product* atau Produk Nasional Bruto (PNB), sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dengan demikian akan mempengaruhi *Gross National Product* atau Produk Nasional Bruto (PNB) (Nopirin, 2014). Keynes

mengasumsikan bahwa perekonomian belum mencapai *full employment*. Oleh karena itu, produksi masih dapat ditingkatkan tanpa mengubah tingkat upah dan tingkat bunga (Nopirin, 2014). Dengan menurunkan tingkat bunga, investasi dapat dirangsang untuk meningkatkan produk nasional. Dengan demikian setidaknya untuk jangka pendek, kebijaksanaan moneter dalam teori Keynes berperan untuk meningkatkan produk nasional.

2.1.2.4 Teori Transmisi Kebijakan Moneter

Teori Transmisi Kebijakan Moneter yang dikembangkan oleh Mishkin (2016) menjelaskan bagaimana kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral dapat memengaruhi variabel ekonomi seperti output dan inflasi melalui berbagai saluran transmisi. Mishkin menekankan bahwa transmisi kebijakan moneter tidak hanya terjadi melalui saluran suku bunga, tetapi juga melalui saluran lainnya, seperti harga aset, nilai tukar, kredit, serta ekspektasi masyarakat. Saluran suku bunga bekerja ketika bank sentral menyesuaikan suku bunga kebijakan, yang kemudian memengaruhi suku bunga pinjaman dan investasi, serta konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, saluran harga aset menjelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi harga saham dan obligasi, yang kemudian berdampak pada kekayaan dan konsumsi masyarakat. Selain itu, saluran nilai tukar menunjukkan bahwa perubahan suku bunga dapat memengaruhi apresiasi atau depresiasi mata uang, yang berpengaruh pada ekspor dan impor. Mishkin juga menyoroti pentingnya saluran kredit, di mana kebijakan moneter dapat memengaruhi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada dunia

usaha dan rumah tangga, serta saluran ekspektasi, yang menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan moneter dapat menentukan perilaku konsumsi dan investasi. Dengan memahami berbagai saluran ini, bank sentral dapat lebih efektif dalam merancang kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi (Mishkin, 2016).

2.1.2.5 Suku Bunga Acuan Bank Indonesia

Dalam mengendalikan kestabilan akan nilai Rupiah, Bank Indonesia mempunyai hak dalam menetapkan jumlah besaran instrumen kebijakan moneter. Bank Indonesia menetapkan suku bunganya sendiri atau yang lebih dikenal dengan *BI Rate*. *BI Rate* merupakan suku bunga acuan dalam suatu perbankan di Indonesia. *BI Rate* juga berfungsi sebagai *refrence rate* dalam mengendalikan kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi di Indonesia (Bank Indonesia, 2016).

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar *Bank Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah

ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan di perkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan respons (*stance*) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme RDG Bulanan dengan cukupan materi bulanan (Bank Indonesia, 2016).

1. Respon kebijakan moneter (*BI Rate*) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya.
2. Penetapan respon kebijakan moneter (*BI Rate*) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (*lag of monetary policy*) dalam mempengaruhi inflasi.
3. Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan *stance* Kebijakan Moneter dapat dilakukan sebelum RDG bulanan melalui RDG mingguan.

2.1.3 Nilai Tukar Mata Uang

2.1.3.1 Pengertian Nilai Tukar Mata Uang

Menurut Sukirno (2006) Nilai tukar menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Nilai tukar dapat juga di definisikan sebagai jumlah uang domestik yang di butuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.

Menurut Ekanda (2015) nilai tukar atau kurs (*foreign exchange rate*) dapat didefinisikan sebagai harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangan ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang

tersebut, atau dengan kata lain nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain.

Nilai tukar merupakan semacam harga di dalam suatu pertukaran. Demikian juga pertukaran antara dua mata uang yang beredar, maka akan terdapat perbandingan nilai/ harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang sering disebut dengan kurs (*exchange rate*). Misalnya nilai tukar menunjukkan bahwa US\$ 1.00 sama dengan Rp. 14.000, berarti untuk memperoleh satu dollar Amerika Serikat dibutuhkan 14.000 rupiah Indonesia. Nilai tukar diantara dua negara kerap kali berbeda diantara satu masa dengan masa yang lainnya.

Kenaikan nilai tukar disebut apresiasi dan penurunan nilai tukar disebut depresiasi. Kadang-kadang anda mendengar media massa melaporkan bahwa dolar sedang “menguat” dan “melemah”. Pernyataan ini biasanya mengacu pada perubahan-perubahan terbaru dari nilai tukar. Jika suatu mata uang mengalami apresiasi, dikatakan bahwa mata uang itu menguat karena dapat membeli lebih banyak uang asing. Demikian pula ketika suatu mata uang mengalami depresiasi, dikatakan bahwa mata uang tersebut melemah.

Pergerakan kurs mata uang akan berdampak pada nilai komoditi dan aset sebab kurs dapat memengaruhi jumlah arus masuk kas yang diterima dari ekspor atau dari anak perusahaan dan memengaruhi jumlah arus kas keluar yang digunakan untuk membayar impor. Kurs nilai tukar mengukur nilai satu satuan mata uang terhadap mata uang lain. Apabila kondisi ekonomi berubah, kurs mata uang dapat berubah cukup besar. Penurunan nilai pada suatu mata uang disebut depresiasi

(*depreciation*), sedangkan peningkatan nilai suatu mata uang disebut apresiasi (*appreciation*).

Perbedaan tingkat nilai tukar atau lazim juga disebut kurs ditimbulkan karena beberapa hal:

1. Perbedaan antara kurs beli dan kurs jual oleh para pedagang valuta asing/bank. Kurs beli adalah kurs yang dipakai apabila para pedagang valuta asing/bank membeli valuta asing, dan kurs jual apabila mereka menjual. Selisih kurs tersebut merupakan keuntungan bagi para pedagang.
2. Perbedaan kurs yang diakibatkan oleh perbedaan dalam waktu pembayarannya.
3. Perbedaan dalam tingkat keamanan dalam penerimaan hak pembayaran. Sering terjadi bahwa penerima hak pembayaran yang berasal dari bank asing yang sudah terkenal (*bonatifide*) kurs beli lebih tinggi daripada yang belum terkenal.

2.1.3.2 Teori Nilai Tukar atau Kurs

1. Teori Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*)

Teori ini diperkenalkan oleh ekonom Swedia, Gustav Cassel pada tahun 1918. “Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*) merupakan suatu teori keuangan internasional yang terkenal dan kontroversial. Teori ini bertujuan untuk melihat hubungan antara inflasi dan nilai tukar secara kuantitatif. Secara pasti, teori PPP menyatakan bahwa keseimbangan kurs akan menyesuaikan dengan besaran perbedaan tingkat inflasi di antara dua negara (Madura, 2009).

Daya tarik dari teori ini terletak pada pernyataan bahwa kurs antara dua mata uang dari dua negara, sama dengan nisbah atau rasio tingkat harga kedua negara bersangkutan. Seperti yang kita ketahui bahwa daya beli domestik dari mata uang suatu negara tercermin sepenuhnya pada tingkat harga yang berlaku di negara itu sendiri. Dengan demikian teori paritas daya beli memprediksi bahwa penurunan daya beli uang domestik (ditunjukkan oleh kenaikan tingkat harga domestik) akan diiringi dengan depresiasi mata uang secara proporsional dalam pasar valuta asing (Salvotre, 1997: 124).

Teori paritas daya beli terdiri dari dua tipe yaitu teori paritas daya beli absolut dan teori paritas daya beli relatif (Salvotre, 1997: 127):

a. Teori Paritas Daya Beli Absolut (*Absolute Purchasing-Power Parity Theory*)

Teori paritas daya beli absolut menyatakan bahwa kurs ekuilibrium sama dengan rasio tingkat-tingkat harga yang berlaku di kedua negara yang terkait.

Secara spesifik, persamaannya adalah:

$$R_{ab} = P_a/P_b$$

Dimana R_{ab} adalah kurs antara mata uang negara A dan mata uang dari negara B, sedangkan P_a dan P_b mengacu pada tingkat harga-harga umum yang berlaku diantara kedua negara.

b. Teori Paritas Daya Beli Relatif (*Relative Purchasing-Power Parity Theory*)

Teori paritas daya beli relatif menyatakan bahwa perubahan kurs dalam jangka waktu tertentu akan bersifat proporsional atau sebanding besarnya terhadap perubahan tingkat-tingkat harga yang berlaku di kedua negara selama periode yang sama.

2.1.3.3 Sistem Nilai Tukar

Menurut Kuncoro (2001) terdapat lima sistem nilai tukar yang berlaku dalam transaksi perdagangan atau perekonomian Indonesia, yaitu:

1. Sistem Nilai Tukar Mengambang (*Floating Exchange Rate*)

Di dalam sistem nilai tukar mengambang ini ditentukan oleh mekanisme pasar atau tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam upaya stabilisasi melalui kebijakan moneter. Terdapat dua macam sistem nilai tukar mengambang, yaitu Nilai tukar mengambang bebas atau murni merupakan nilai tukar yang telah ditentukan oleh mekanisme pasar secara penuh tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Sedangkan dalam nilai tukar mengambang terkendali terdapat campur tangan pemerintah yaitu nilai tukar yang stabil pada tingkat tertentu dari otoritas moneter yang telah berperan aktif.

2. Sistem Nilai Tukar Terlambat (*Pegged Exchange Rate*)

Sistem nilai tukar terlambat merupakan suatu sistem dimana suatu negara mengaitkan nilai tukar mata uangnya dengan mata uang negara lain, yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang utama, ini berarti mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang dari negara yang menjadi tambatannya.

3. Sistem Nilai Tukar Terlambat Merangkak (*Crawling Pegs*)

Di dalam sistem ini negara melakukan sedikit perubahan terhadap mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak ke arah suatu nilai tertentu dalam rentang waktu tertentu. Keuntungan utama dari sistem ini adalah negara dapat mengukur penyelesaian nilai tukarnya dalam periode yang lebih lama jika dibandingkan dengan sistem nilai tukar terlambat.

4. Sistem Sekeranjang Mata Uang (*Basket of Currencies*)

Dalam sistem ini, pemberian bobot pada nilai mata uang berbeda-beda tergantung dari relatifnya pada suatu negara tersebut. Keuntungannya adalah sistem ini menawarkan stabilitasi mata uang suatu negara karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Mata uang yang dimasukkan dalam keranjang biasanya ditentukan oleh besarnya peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu.

5. Sistem Nilai Tukar Tetap (*Fixed Exchange Rate*)

Dalam sistem ini negara menetapkan dan mengumumkan suatu nilai tukar tertentu atas mata uangnya dan menjaga nilai tukar dengan cara membeli atau menjual valuta asing dalam jumlah yang tidak terbatas dalam nilai tukar tersebut. Bagi negara yang memiliki ketergantungan tinggi pada sektor luar negeri maupun gangguan seperti mengalami gangguan alam, menetapkan nilai tukar tetap merupakan suatu kebijakan yang beresiko tinggi.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ahmad, 2020. "Analisis Pengaruh BI Rate, dan Nilai Tukar terhadap IHK di Indonesia".	Menggunakan metode VECM, variabel BI Rate, dan nilai tukar sebagai variabel independen	Fokus pada periode Tahun 2010-2019	Nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap IHK	Jurnal Ekonomi Indonesia, Vol. 12, No. 3
2	Budi & Ani, 2021. "Dampak Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Inflasi di ASEAN"	Metode VAR, variabel BI Rate dan nilai tukar	Tidak meneliti inflasi Studi komparatif di 5 negara ASEAN	<i>BI Rate</i> berpengaruh kuat terhadap IHK di Indonesia	ASEAN Journal of Economics, Vol. 8, No. 2
3	Citra, 2022. "Pengaruh PPN dan BI Rate terhadap Inflasi: Pendekatan VECM"	Menggunakan VECM, variabel BI Rate	Tidak meneliti PPN dan inflasi Fokus pada data kuartalan Tahun 2015-2021	BI Rate memiliki pengaruh jangka panjang terhadap IHK	Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol. 10, No. 1
4	Darma, 2020. "Analisis Dinamika Nilai Tukar dan BI Rate terhadap IHK di Indonesia"	Metode VAR, variabel nilai tukar dan BI Rate	Fokus pada periode Tahun 2008-2019	Nilai tukar memiliki pengaruh signifikan terhadap IHK	Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5, No. 4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Eka, 2021. "Pengaruh Kebijakan PPN dan BI Rate terhadap Inflasi di Indonesia"	Menggunakan VECM, variabel BI Rate	Tidak meneliti PPN Fokus pada data bulanan Tahun 2010-2020	BI Rate memiliki pengaruh dominan terhadap IHK	Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 7, No. 2
6	Fajar, 2023. "Dampak Nilai Tukar dan BI Rate terhadap IHK: Studi Kasus Indonesia".	Metode VAR, variabel nilai tukar dan BI Rate	Fokus pada periode Tahun 2015-2022	Nilai tukar memiliki pengaruh jangka pendek terhadap IHK	Jurnal Ekonomi Terapan, Vol. 9, No. 3
7	Gita, 2020. "Analisis Pengaruh PPN terhadap IHK dengan Pendekatan VECM"	Menggunakan VECM	Tidak meneliti PPN Fokus pada data tahunan 2000-2019	PPN berpengaruh signifikan terhadap IHK dalam jangka panjang	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6, No. 1
8	Hadi, 2021. "Pengaruh BI Rate dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia"	Metode VAR, variabel BI Rate dan nilai tukar	Fokus pada data bulanan Tahun 2010-2020	BI Rate dan nilai tukar berpengaruh terhadap IHK	Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol. 8, No. 2
9	Indra, 2022. "Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap IHK di Indonesia"	Menggunakan VECM, variabel BI Rate	Fokus pada data kuartalan 2010-2021	PPN dan BI Rate berpengaruh signifikan terhadap IHK	Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, Vol. 11, No. 4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Joko, 2020. "Analisis Pengaruh Nilai Tukar terhadap IHK dengan Metode VAR"	Metode VAR, variabel nilai tukar	Tidak menelitian BI Rate Fokus pada periode Tahun 2010-2019	Nilai tukar memiliki pengaruh kuat terhadap IHK	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 7, No. 3
11	Kiki, 2021. "Pengaruh PPN dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia"	Menggunakan VECM, variabel nilai tukar	Tidak menelitian PPN Fokus pada data bulanan 2015-2020	PPN dan nilai tukar berpengaruh terhadap IHK	Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 9, No. 2
12	Lina, 2023. "Dampak BI Rate terhadap IHK: Studi Kasus Indonesia"	Metode VAR, variabel BI Rate	Tidak Meneliti Kurs Fokus pada periode Tahun 2010-2022	BI Rate memiliki pengaruh signifikan terhadap IHK	Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 10, No. 1
13	Mira, 2020. "Analisis Pengaruh BI Rate, dan Nilai Tukar terhadap IHK di Indonesia"	Menggunakan VECM, variabel BI Rate, dan nilai tukar	Fokus pada data tahunan 2005-2019	Ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap IHK	Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 6, No. 2
14	Nia, 2021. "Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap IHK di Indonesia"	Metode VAR, variabel BI Rate dan nilai tukar	Tidak menelitian BI Rate Fokus pada data bulanan Tahun 2010-2020	BI Rate memiliki pengaruh dominan terhadap IHK	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8, No. 4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Oki, 2022. "Dampak PPN dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia"	Menggunakan an VECM, variabel nilai tukar	Tidak Meneliti PPN dan BI Rate Fokus pada data kuartalan 2010-2021	PPN dan nilai tukar berpengaruh terhadap IHK	Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 5, No. 2

2.2 Kerangka Pemikiran

Sudah merupakan ketentuan umum bilamana pemecahan suatu masalah diperlukan suatu landasan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasannya tersebut mempunyai arah yang pasti dalam penyelesaiannya. Maka dari itu, penulis menyusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antar variabel yakni seperti berikut.

Hubungan antara *BI Rate* (suku bunga acuan Bank Indonesia) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) berkaitan erat melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter. Ketika *BI Rate* meningkat, biaya pinjaman bagi konsumen dan pelaku usaha juga naik, yang pada gilirannya dapat menekan permintaan agregat dan menurunkan tekanan inflasi. Menurut teori moneterisme yang dikemukakan oleh Friedman (1968), pengendalian suku bunga merupakan instrumen efektif dalam menjaga stabilitas harga melalui pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar. Hal ini sejalan dengan pendapat Mishkin (2019) yang menyatakan bahwa suku bunga acuan merupakan alat utama bank sentral dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, *BI Rate* berperan sebagai instrumen kebijakan moneter yang strategis dalam mempengaruhi tingkat inflasi yang tercermin dalam IHK.

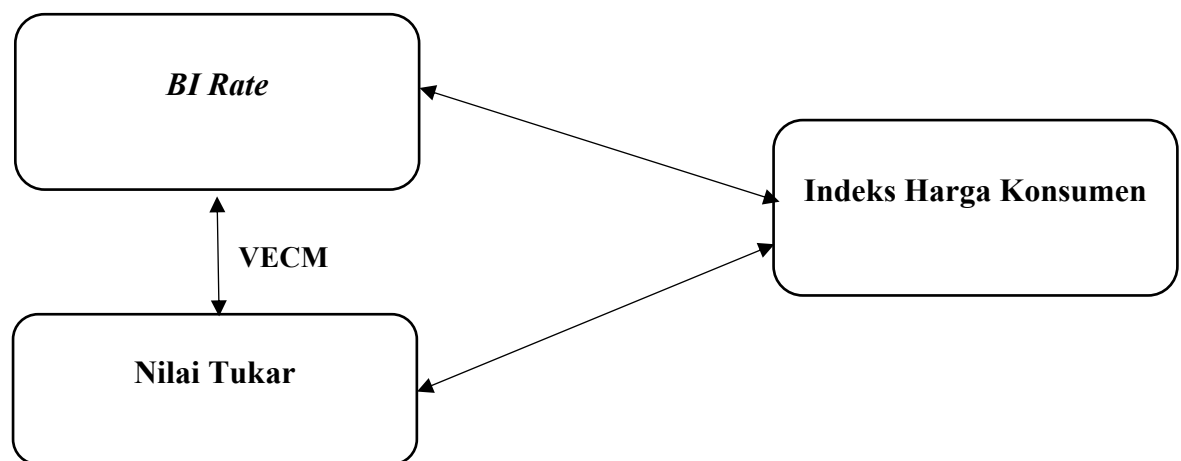
Penelitian Hadi (2021) menunjukkan bahwa BI Rate memiliki pengaruh signifikan terhadap IHK, terutama dalam jangka pendek, karena perubahan suku bunga langsung memengaruhi biaya pinjaman dan daya beli masyarakat. Selain itu, penelitian Nia (2021) menemukan bahwa *BI Rate* efektif dalam mengendalikan inflasi melalui penurunan permintaan agregat, yang tercermin dalam penurunan IHK. Namun, efektivitas BI Rate juga tergantung pada kondisi ekonomi makro, seperti stabilitas nilai tukar dan ekspektasi inflasi (Darma, 2020).

Hubungan antara nilai tukar dan Indeks Harga Konsumen (IHK) berkaitan erat melalui mekanisme transmisi harga impor dan daya beli masyarakat. Ketika nilai tukar mata uang domestik melemah terhadap mata uang asing, harga barang dan jasa impor cenderung naik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan IHK. Menurut teori *Purchasing Power Parity* (PPP) yang dikemukakan oleh Gustav Cassel (2018), perubahan nilai tukar akan mempengaruhi tingkat harga domestik melalui penyesuaian harga barang impor. Hal ini sejalan dengan pendapat Dornbusch (2020) dalam teori *overshooting exchange rate*, di mana fluktuasi nilai tukar dapat menyebabkan lonjakan harga dalam perekonomian domestik. Dengan demikian, stabilitas nilai tukar menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi yang terukur dan stabilitas harga di pasar domestik.

Penelitian Fajar (2023) menunjukkan bahwa depresiasi nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap kenaikan IHK, terutama di negara yang sangat bergantung pada impor, seperti Indonesia. Selain itu, penelitian Joko (2020) menemukan bahwa volatilitas nilai tukar dapat meningkatkan ketidakpastian harga, yang pada akhirnya memengaruhi IHK melalui mekanisme *imported inflation*.

Namun, dampak nilai tukar terhadap IHK juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur ekonomi, tingkat ketergantungan pada impor, dan kebijakan stabilisasi harga oleh pemerintah (Darma, 2020).

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Diduga terdapat hubungan kausalitas antara *BI Rate* dan Nilai Tukar dengan Indeks Harga Konsumen Indonesia di tahun 2019 – 2024.
2. Diduga *BI Rate* dan Nilai Tukar memiliki pengaruh positif dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap Indeks Harga Konsumen Indonesia tahun 2019 – 2024.

3. Diduga *shock* yang ditimbulkan oleh *BI Rate* dan Nilai Tukar dapat berpengaruh terhadap Indeks Harga Konsumen.
4. Diduga pengaruh *BI Rate* terhadap Indeks Harga Konsumen lebih besar dibandingkan Nilai Tukar.